

KRISIS LINGKUNGAN, KRISIS PANGAN:

ANCAMAN YANG MENGALIR DARI
HUTAN HINGGA LAUT.



WALHI
SELAMATI SELAMAH

FAKTA
EKOLOGI

BULETIN FAKTA EKOLOGI BULAN OKTOBER 2025

Buletin Fakta Ekologi merupakan publikasi yang awalnya dikembangkan dari serial 'Fakta Ekologi' yang terbit pertama kali pada bulan maret tahun 2023. Buletin ini diproduksi oleh Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan. Sama Halnya dengan buletin pada umumnya, Buletin Fakta Ekologi juga menyajikan rubrik yang terdiri dari empat bagian. Pertama, ada rubrik yang kami beri nama **Alarm SulSel** (berisi tentang infografis kondisi lingkungan hidup), Kedua ada **Fakta Ekologi** (laporan riset yang disajikan dalam bentuk tulisan atau Foto Esai), Ketiga ada **Cerita Kampung** (memuat cerita dan fakta dari akar rumput), dan terakhir yakni rubrik **Info WALHI SulSel** (berisi tentang informasi mengenai aktivitas WALHI Sulawesi Selatan). Selanjutnya, pada edisi agustus kali ini tim fakta ekologi mengangkat isu dalam rangka Hari Pangan Internasional dengan judul **Krisis Lingkungan, Krisis Pangan: Ancaman yang Mengalir dari Hutan hingga Laut.**

Tim Kerja Buletin Fakta Ekologi

Pimpinan Redaksi

Fadila Abdullah

Tim Penulis

Zulfaningsih HS, Shakira Oqmalia Firdany, Andi Putri Cahyaningrum, Syabila Nur Ramadhani Putri, Fadila Abdullah, Tim Mengalir Fest 2025, Jejaring Perempuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nusantara, dan Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSa (Geram PLTSa).

Desain dan Tata Letak

Fitrah Yusri

Editor

Slamet Riadi



ALARM  SULSEL

PULIHKAN TANAH KAMI SEKARANG

Ditulis oleh: Zulfaningsih HS



Dokumentasi Investigasi WALHI Sulsel. Oktober 2025

Sulawesi Selatan kembali diguncang kabar yang mengkhawatirkan. Kebocoran pipa milik PT Vale Indonesia mencemari sawah, sungai, dan sumber air yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Air yang seharusnya menjadi sumber penghidupan kini berubah menjadi ancaman. Bagi petani, ini berarti ancaman gagal panen; bagi ibu-ibu, ini berarti kekhawatiran setiap kali mengambil air untuk masak dan minum; bagi anak-anak, ini berarti masa depan kesehatan mereka dipertaruhkan.

Sabtu pagi, 23 Agustus 2025, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dikejutkan oleh peristiwa yang menjadi alarm keras bahwa ruang hidup masyarakat terus berada di ujung tanduk. Pukul 07.30 WITA, pipa minyak milik PT Vale Indonesia mengalami kebocoran. Titik kebocoran ini berada hanya sekitar 20 kilometer dari pabrik pengolahan Vale Indonesia, sebuah jarak yang seharusnya memungkinkan deteksi dan respon cepat – namun faktanya, minyak tetap mengalir masuk ke saluran irigasi dan membanjiri sawah warga.

Keterangan resmi yang disampaikan PT Vale Indonesia dan pemerintah daerah yang disampaikan oleh Bupati Luwu Timur menyebut kebocoran ini sebagai bencana akibat pergeseran tanah dan faktor usia pipa. Namun, bagi warga, pernyataan itu terasa seperti upaya mengalihkan tanggung jawab. Dalam wawancara kami dengan Lisye Delyati, warga Desa Lioka, ia dengan tegas menolak anggapan bahwa peristiwa ini murni bencana.

"saya secara pribadi sebenarnya tidak terima walaupun pemerintah sendiri melalui Bupati Luwu Timur apa yang disampaikan PT Vale Indonesia bahwa kejadian tersebut adalah bencana. Saya tentu tidak setuju, saya masih anggap itu suatu kelalaian. Karena apa setiap hari, saya bahkan sering ketemu dengan karyawan perusahaan – setau saya PT Vale Indonesia itu punya departemen khusus untuk bagian maintenance, khusus untuk pipa minyak, khusus untuk tower line, atau apalah namanya di perusahaan itu. Jadi kenapa mereka tiap hari lewat itu tidak memeriksa? Kalau memang ini karena gempa bumi kenapa tidak klepnya yang rusak? Berarti kalau memang gara-gara gempa terus dia bocor, ini bocor, berarti pipanya itu sudah aus, mereka tidak pernah mengecek bahwa itu pipanya sudah layak atau tidak layak."

Lisye Delyanti memperjelas betapa luas dan mendalam dampak kebocoran pipa ini. Lebih dari 20 kepala keluarga terdampak langsung. Sawah mereka—seluas 38 hektare—terendam minyak, sementara sungai Kurmesilo dan beberapa hulu sungai lain ikut tercemar. Air yang selama ini menjadi penopang kehidupan justru menjadi sumber bencana.

Penduduk Desa Lioka sebagian besar adalah petani sawah. Lisye bercerita bahwa mereka baru saja kembali bekerja di sawah setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat kerusakan irigasi. *"Baru tiga kali panen, kita baru mulai lagi kerja sawah karena baru bagus pengairannya,"* ungkapanya. Setelah tiga hingga empat musim terakhir mereka bisa kembali menanam—berkat sedikit bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki *drainase* yang roboh—kini kerja keras itu hancur seketika oleh genangan minyak.

Selain sawah, masyarakat juga menggantungkan hidup dari kebun merica dan sayuran. Namun sawah tetap menjadi sumber utama pangan dan penghasilan. *"Kami mengerjakan sawah itu sudah musim keempat, dalam setahun dua kali panen. Sejak 2024 baru kami masyarakat Lioka kerja sawah lagi,"* kata Lisye.

Sebelum pencemaran terjadi, masyarakat Lioka bisa menjual beras dengan harga Rp14.000–Rp15.000 per kilogram, bahkan mencukupi kebutuhan

pangan keluarga tanpa membeli beras dari luar. Namun kini, setelah sawah mereka terendam minyak, situasi berbalik 180 derajat—mereka menghadapi kenyataan pahit: dari penjual beras, mereka akan kembali menjadi pembeli.

Kondisi di Dusun Mondoe bahkan lebih parah. Minyak yang mengendap di sawah membuat warga takut untuk kembali turun ke sawah. Mereka tidak tahu kandungan zat berbahaya apa yang ada dalam minyak itu, dan berapa lama lagi tanah mereka bisa kembali ditanami. *“Dampaknya sangat parah dan membuat kami masyarakat sangat terpuak kalau untuk saat ini. Karena kita lagi bergairah-bergairahnya kerja sawah, di mana, sekarang kan apalagi yang beras lagi mahal-mahalnya,”* tutur Lisye.

Selain sawah yang menjadi sumber utama pangan dan penghasilan, masyarakat Desa Lioka juga menggantungkan hidup pada kebun sayur yang mereka tanam di sekitar sawah. Namun sejak kebocoran pipa terjadi, warga tak lagi berani mengonsumsi sayuran tersebut. *“Itu sangat berdampak, karena sayur yang kami tanam, itu yang kami konsumsi tiap hari. Sejak ada kebocoran pipa, kami sangat takut makan sayur,”* ujar Lisye. Pemerintah bahkan mengeluarkan pemberitahuan agar sayur di sekitar sawah sementara tidak dikonsumsi karena belum diketahui kandungan zat berbahaya dalam minyak yang mencemari lahan. Jika benar minyak yang bocor adalah *HFSO (High Fuel Sulphur Oil)*, risiko kesehatannya jelas sangat tinggi.

Kekhawatiran terbesar warga bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk tahun-tahun mendatang. *“Kerusakan jangka panjang yang paling kami khawatirkan adalah belum tentu kami bisa menanam dua atau tiga tahun ke depan. tiga, empat, atau lima tahun ke depan belum tentu kami bisa menanam. Bayangkan, kami harus beli beras selama itu,”* kata Lisye. Mereka tidak berani menanam sayur apa pun di lahan yang tercemar karena takut dampak racun.

Dampak pencemaran tidak berhenti di sawah dan kebun. Empang-empang warga yang menjadi sumber ikan dan air untuk ternak kini tercemar. Banyak ikan ditemukan mati, dan hewan ternak terpaksa dievakuasi untuk

mencegah keracunan. “Berarti kalau kita lihat dari ternak-ternak yang ikan yang mati berarti sangat merusak ekosistem makhluk hidup,” tegas Lisye. Hilangnya ikan dan air bersih bagi ternak berarti rantai pangan desa rusak dari hulu hingga hilir.

Dari sisi kesehatan, warga memang belum melaporkan gejala serius secara massal, tetapi kasus perorangan mulai muncul. Ada warga yang setelah memegang air tercemar mengeluhkan sesak nafas, bahkan ada yang merasa pahit di tenggorokan dan kesulitan menelan. Perusahaan memang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, tetapi kekhawatiran warga tetap tinggi karena belum ada kepastian tentang kandungan minyak dan dampaknya terhadap tubuh manusia.

Lisye juga mengungkapkan perasaan yang begitu mendalam tentang beratnya hidup berdampingan dengan perusahaan raksasa. “Bagi kami yang hidup berdampingan dengan perusahaan raksasa, kalau saya pribadi, fasilitas PT. Vale Indonesia yang kami nikmati itu hanya sebagian kecil—bahkan sangat kecil—tidak sebanding dengan apa yang mereka ambil dari kami. Itu pertama, jadi sakit dong perasaan ini, sakit dong. Terus kedua, coba masuk di Dusun Molondoe, ada tidak di sana itu karyawan Vale? Tidak ada masyarakat yang bekerja sebagai karyawan Vale. Apa kami menikmati? Tidak, kan? Fasilitasnya Vale itu bukan untuk kami. Jadi kalau mau dibilang bagaimana perasaan kami berdampingan dengan perusahaan, ya sakitlah.”

Nada suaranya bergetar, bukan hanya karena marah tetapi juga karena luka yang sudah terlalu lama dipendam. “Kenapa saya bilang sakit? Karena bagi kami itu bukan sekedar sawah, itu ‘kolodi’. Dari dulu orang tua kami memanggilnya sawah kolodi. Jadi kalau kami mau pergi sawah, kami bilang, ‘oh, mau pergi di kolodi.’ Itu sawah yang dari kecil kami tempati main, yang dulu airnya jernih, yang ada keong bisa kami pungut untuk dimakan, ada ikan-ikan kecil yang anak-anak bisa tangkap, tempat kami tanam sayur-sayuran walaupun kami tidak sedang tanam padi. Bahkan kami bisa menanam jagung di tengah sawah waktu air sedang surut. Tapi sekarang? Lihatlah—semua itu rusak. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Rasanya sakit sekali, sangat tidak enak, sangat sedih melihat sawah dalam keadaan seperti ini. Kami bahkan bingung harus bagaimana—mau dikerok, mau dikeringkan, kami tidak tahu. Itu sawah, ruang hidup kami.”

“Yang paling terdampak di sana, yang paling parah, boleh dibilang kita pasrah-pasrah saja bagaimana kalau kita bisa kerja sawah lagi, bagaimana yang kemarin sumber penghasilannya dari sawah kasian,” kata Lisye. Pasrah di sini bukan tanda menerima nasib, tetapi cermin hilangnya kepastian hidup akibat lambatnya pemulihan.



Titik Isolasi PT. Vale Indonesia/WALHI Sulsel. Oktober 2025

Upaya pembersihan memang sedang berjalan. Minyak terus diambil dari permukaan sungai, filter dipasang untuk menahan sebaran pencemaran, dan sebagian warga diberdayakan dalam pekerjaan pembersihan. Namun lambatnya proses pembersihan menambah penderitaan. *“Mungkin karena pengaruh kental sekali minyaknya, jadi ya agak-agak lama untuk mau bersihkan betul,”* kata Lisye. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan lingkungan tidak sebentar, dan semakin lama sawah tidak bisa ditanami, semakin lama pula warga kehilangan penghasilan.

“Tuntutan kami sederhana,” tegas Lisye, *“kami hanya minta transparansi.”* Sampai detik ini, warga belum diberi hasil laboratorium dari minyak yang mencemari sawah dan sungai mereka. Mereka tidak tahu apa saja zat berbahaya yang kini meresap ke tanah tempat mereka menggantungkan hidup. *“Bagaimana kami bisa tenang kalau kami tidak tahu apa yang kami hadapi?”*

Bukan hanya soal transparansi, Lisye juga menyoroti kompensasi yang tak kunjung jelas. Hingga kini, belum ada pembicaraan yang tuntas mengenai ganti rugi. Bahkan kompensasi yang diajukan perusahaan pun belum ditandatangani warga. *"Kami mau lihat dulu hasilnya. Kalau ternyata zat itu berbahaya dan nilai kompensasi tidak sebanding dengan kerusakan yang kami alami, itu namanya merugikan kami,"* ujarnya.

Namun, bagi Lisye, uang bukanlah satu-satunya jawaban. Kerusakan lingkungan yang terjadi jauh lebih mahal dari sekadar rupiah. Sungai tercemar, sawah tak bisa ditanami, ikan di empang mati, dan masyarakat terpaksa membeli beras selama bertahun-tahun ke depan. *"Kami minta PT. Vale Indonesia serius, jangan setengah-setengah. Air ini harus benar-benar bersih, masa perusahaan sebesar itu tidak bisa cari teknologi yang lebih baik untuk menyaring minyak? Ini sungai terbesar di sini, dan kami dengar pencemarannya sudah sampai ke Danau Matano dan Bantilang,"* katanya dengan nada getir.

Lisye tak kuasa menahan emosi saat membayangkan masa depan kampungnya. *"Kasian kami. Kalau saya bicara ini, pasti saya menangis, karena itu tempat hidup kami, tempat mamaku, nenekku. Tidak boleh dibiarkan begini. Mau tidak mau, mereka harus tangani sampai tuntas, sampai kami bisa kelola sawah lagi. Saya tidak peduli, harus dipulihkan. Kalau perlu, hentikan dulu operasi perusahaan sampai lingkungan kami bersih. Ini rumah kami, kami tidak mungkin pindah. Kalau mereka tidak mau tangani, kami akan lawan. Kalau perlu, kami akan demonstrasi."*

Bagi Lisye, pencemaran ini bukan hanya soal minyak yang tumpah, tetapi tentang harga diri, hak hidup, dan masa depan generasi di kampungnya. Ia menegaskan bahwa perusahaan sebesar PT Vale Indonesia seharusnya sudah memiliki prosedur darurat yang siap dijalankan jika terjadi kebocoran. *"Mereka harus bertanggung jawab. Ini bukan wilayah tambang mereka, ini wilayah warga. Kalau pipa mereka bocor, itu konsekuensi mereka. Tidak bisa dibiarkan,"* tegasnya.

Kenyataan ini menegaskan bahwa kebocoran pipa PT Vale Indonesia bukan sekadar insiden teknis, melainkan bencana ekologis yang memutus rantai kehidupan masyarakat. Pangan, air, ekonomi, dan kesehatan mereka semua



Dokumentasi Investigasi WALHI Sulsel. Oktober 2025

terdampak sekaligus. Maka wajar jika warga menuntut tanggung jawab penuh dari perusahaan dan pemerintah: transparansi kandungan minyak, pemulihan lahan hingga layak tanam, kompensasi kerugian ekonomi, dan jaminan keselamatan kesehatan jangka panjang. Tanpa langkah konkret itu, kebocoran ini akan menjadi luka sosial-ekologis yang terus menganga di Desa Lioka dan desa-desa terdampak lainnya seperti Barugah, Matompi, Rengkie Raya, dan Kumampu.

Masyarakat Mula Baru, Tamalalang,
Alamanda, dan Akasia Menolak PLTSa:

KECAM KETERLIBATAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DALAM MOU DENGAN PT SUS

*Ditulis oleh:
Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSa (Geram PLTSa)*



Makassar, [19/09/2025] – Masyarakat Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSa (Geram PLTSa) mengecam keras langkah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (Unhas) yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Utama Sinergi (SUS). Kerjasama tersebut dianggap sebagai bentuk keterlibatan institusi pendidikan dalam praktik yang berpotensi merampas hak-hak masyarakat dan mengabaikan prinsip keadilan lingkungan.

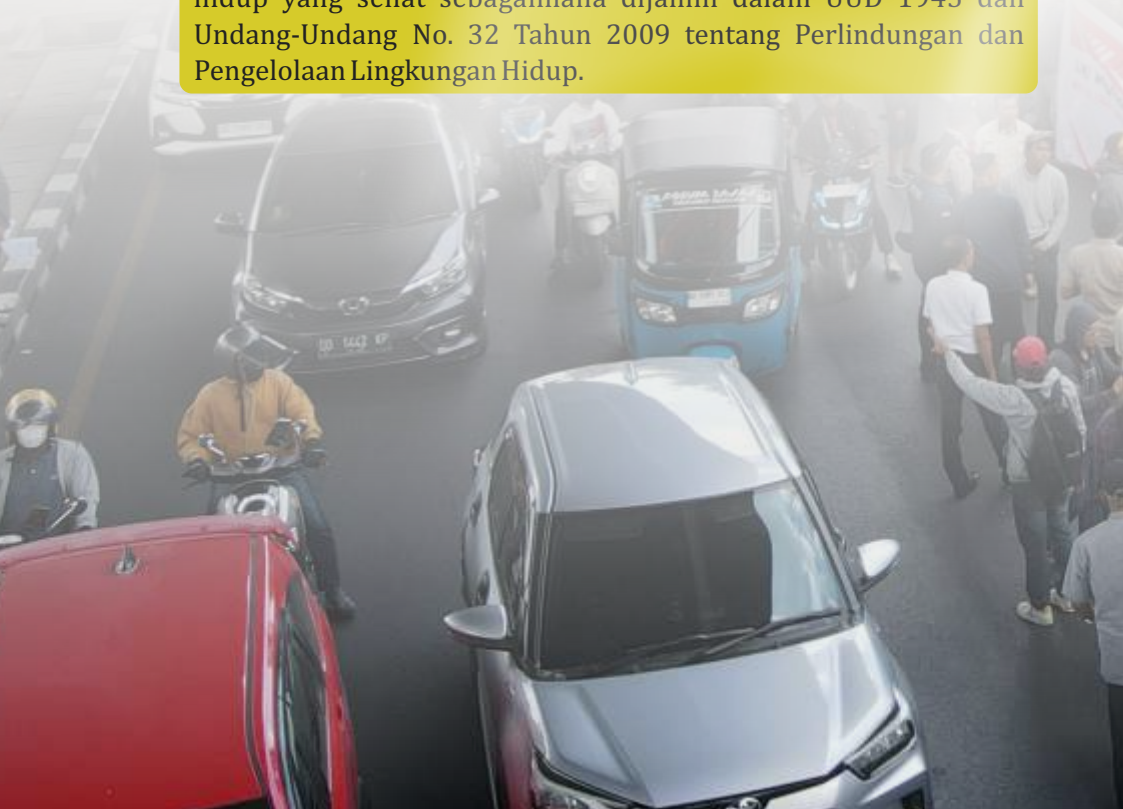


“Universitas seharusnya berdiri di garda terdepan membela kepentingan rakyat dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, bukan justru melegitimasi proyek yang mengancam ruang hidup kami,” tegas Akbar, Koordinator Aliansi Geram PLTSa.

Warga menilai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui skema PSEL yang digagas bersama PT SUS bukanlah solusi atas krisis energi dan sampah di Makassar, melainkan justru akan menimbulkan masalah baru. PLTSa terbukti menimbulkan risiko serius berupa pencemaran udara, polusi iklim, ancaman kesehatan, dan degradasi lingkungan. Selain itu, proyek ini juga membuka ruang bagi perampasan ruang hidup masyarakat di sekitar lokasi rencana pembangunan.

Masyarakat Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia mendesak:

1. Universitas Hasanuddin menghentikan segala bentuk kerjasama dengan PT SUS, karena bertentangan dengan nilai akademik, etika, dan tanggung jawab sosial universitas.
2. Pemerintah Kota Makassar membatalkan rencana pembangunan PLTSa di wilayah Tamalanrea.
3. Semua pihak menghormati hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



“PLTSa bukanlah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kami menolak PLTSa! Kami menolak PT SUS hadir di kampung kami!” tutup Akbar.

GERAM PLTSa menegaskan akan terus melakukan perlawanan bersama jaringan masyarakat sipil, akademisi kritis, dan organisasi lingkungan hingga rencana proyek ini benar-benar dihentikan di tempat yang tidak seharusnya.



An aerial photograph of a coastal village, likely in Southeast Asia, showing a dense cluster of small buildings with thatched roofs along a shoreline. Numerous small boats are anchored in the shallow, turquoise water surrounding the village. The background shows the deep blue ocean extending to the horizon. The image is overlaid with a semi-transparent teal filter.

FAKTA
EKOLOGI



DELAPAN TUNTUTAN UNTUK PRESIDEN KE-8 RI PRABOWO SUBIANTO

*Ditulis oleh: Jejaring Perempuan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Nusantara*



PERMASALAHAN PESIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau, yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat pesisir. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, namun, dibalik potensi besar tersebut, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil justru menghadapi berbagai persoalan yang serius. Mulai dari abrasi, banjir rob, hingga pencemaran dan kerusakan ekosistem laut yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Hadirnya proyek-proyek besar seperti reklamasi, tambang, dan pariwisata juga menimbulkan masalah bagi ekosistem laut maupun masyarakat pesisir.

Permasalahan ini berdampak langsung terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat terutama perempuan. Di pesisir, perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya, pengelolaan hasil laut, pemenuhan air bersih, hingga mengurus rumah tangga. Krisis air bersih membuat perempuan harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air dan berkurangnya hasil tangkapan ikan menambah beban mereka. Ketika wilayah pesisir rusak akibat tambang, reklamasi, atau privatisasi ruang laut, perempuan seringkali kehilangan sumber penghidupan sekaligus ruang sosialnya.

Selain itu, beban ganda yang dialami perempuan semakin berat karena mereka tidak hanya harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga tetap menjalankan peran domestik di tengah kondisi lingkungan yang memburuk. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, informasi, dan pengambilan keputusan membuat perempuan pesisir berada pada posisi rentan, baik terhadap kemiskinan maupun kekerasan berbasis gender yang meningkat ketika krisis ekonomi terjadi. Dalam banyak kasus, perempuan terpaksa mencari pekerjaan alternatif di sektor informal yang rawan eksploitasi, atau bahkan bermigrasi, sehingga memicu dampak sosial seperti hilangnya peran tradisional dalam komunitas.

Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan pesisir dan pulau-pulau kecil bukan hanya isu lingkungan, tetapi, juga persoalan keadilan sosial dan gender yang mendesak untuk diatasi melalui kebijakan inklusif yang melibatkan perempuan secara aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir.



Pertama, Mendesak Presiden dan Wakil Presiden, untuk mengevaluasi dan mencabut berbagai peraturan perundangan yang mengancam dan tidak melindungi masyarakat dan perempuan serta melindungi ekosistem pesisir, laut, dan pulau kecil. Di antara peraturan perundangan yang harus dievaluasi dan dicabut adalah UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU IKN, dan PP Penangkapan Ikan Terukur.

Kedua, Mendesak Presiden dan Wakil Presiden, untuk mengevaluasi dan mencabut beragam proyek pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat dan perempuan pesisir serta pulau-pulau kecil terutama proyek pembangunan dan ekspansi pertambangan yang dilegalisasi dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil di Indonesia.

Ketiga, Mendesak Presiden dan Wakil Presiden, untuk menjadikan agenda utama pengakuan dan perlindungan masyarakat dan perempuan pesisir serta keadilan iklim dalam perencanaan tata ruang laut, dan pada saat yang sama mengevaluasi tata ruang laut yang terdapat dalam RZWP3K dan RTRW Terintegrasi yang terbukti telah merampas ruang hidup dan memiskinkan kehidupan nelayan dan perempuan.

Keempat, Mendesak Pemerintah di level eksekutif dan legislatif untuk segera memasukan RUU Keadilan Iklim sebagai agenda utama untuk disahkan, sekaligus mendukung upaya-upaya masyarakat untuk memulihkan ekosistem pesisir, laut, dan pulau kecil dari dampak krisis iklim yang semakin parah.

Kelima, Mendesak penetapan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau kecil yang berbasis pada kepentingan nelayan, perempuan, dan anak muda dengan menggunakan prinsip konsultasi bermakna serta Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Penetapan wilayah konservasi harus ditujukan untuk mengakui dan melindungi wilayah kelola masyarakat, bukan untuk meminggirkannya.

Keenam, Mendesak pemerintah untuk segera menjalankan dan menyusun skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana diamanatkan oleh UU 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, dengan memastikan keterlibatan penuh pada masyarakat dan perempuan nelayan. Termasuk perlindungan bagi para pejuang lingkungan, khususnya nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil, serta perempuan nelayan, dari ancaman kriminalisasi yang kerap mengalami tekanan dan intimidasi ketika memperjuangkan hak atas penghidupan, tempat tinggal, dan generasi mereka di masa yang akan datang.

Ketujuh, Menegakkan aturan perlindungan pulau-pulau kecil yang selama ini ditetapkan dan telah dibebani izin wilayah usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan. Mengingat pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan yang tinggi baik secara lanskap, sosial, dan biodiversitasnya.

Kedelapan, Berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya terkait dengan kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Perempuan yang berdomisili di wilayah ini kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi disebabkan sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif.

Deklarator Jejaring Perempuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nusantara

- 1.Asmania, Perempuan Pulau Pari Jakarta
- 2.Aklina, Perempuan Pesisir Pasar Seluma Bengkulu
- 3.Nur Chayati, Perempuan Pesisir Semarang Jawa Tengah
- 4.Zakia, Perempuan Pulau Kodingareng
- 5.Asya, Pesisir Pantai Galesong
- 6.Rostia, Perempuan Pulau Kodingareng
- 7.Sukaeni, Perempuan Pesisir Pajukukang Bantaeng
- 8.Herlina, Perempuan Pesisir Pantai Galesong

- 9.Sita, Perempuan Pulau Kodingareng
- 10.Wana, Perempuan Pesisir Kaluku Bodoa
- 11.Fajra, Pesisir Pantai Merpati Bulukumba
- 12.Devi, Perempuan Pesisir Pajukukang Bantaeng
- 13.Hasana, Perempuan Pesisir Pantai Merpati Bulukumba
- 14.Restin Bangsil, Perempuan Pesisir Manado
- 15.Ade Saska, Ikatan Keluarga Lantebung Makassar

TOLAK REKLAMASI PULAU

Fakta
EKOLOG!

AE



STOP

SAAT IR TAK
MANGALIR
BAKAT
HUMANT ACSI
KORUPSI

AIR HABIS
HIDUP SULIT

IR BUKAN JEMUR SINGGAP
TAPI SUMBER KEMAKHUR

LINT BUKAN
MILIK
INDUSTRI

PULAU KECIL
JIWA BESAR
NUSANTARA

KAMIBUTU
AIR PERSAINGAN

MANGALIR

JEJAK
PERLINDUNGAN
LAUT & KEADILAN
AIR

SEPULUH PAKTA AIR TRANSFORMATIF:

SERUAN WARGA KOTA MAKASSAR UNTUK

PERLINDUNGAN LAUT DAN KEADILAN AIR

DI SULAWESI SELATAN

Ditulis oleh: Tim Mengalir Fest 2025

Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan. Dari laut hingga sungai, dari pulau kecil hingga kota besar, air menghubungkan kita semua dalam satu ekosistem yang rapuh namun penting bagi keberlangsungan hidup. Di Makassar dan Sulawesi Selatan, krisis air bersih, reklamasi, penambangan pasir laut, dan ancaman krisis iklim semakin memperlihatkan betapa rentannya ruang hidup masyarakat pesisir dan perkotaan.

Dalam konteks inilah lahir Sepuluh Pakta Air Transformatif: Seruan Warga Kota Makassar untuk Perlindungan Laut dan Keadilan Air. Dokumen ini merupakan wujud komitmen kolektif untuk menegaskan bahwa air bukanlah komoditas, melainkan hak dasar manusia dan warisan bersama yang harus dijaga.



Pakta ini menyuarakan nilai-nilai yang menempatkan air sebagai pusat kehidupan: sebagai ruang budaya, sosial, spiritual, dan ekologis yang tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan manusia dan alam. Ia juga mengingatkan kita bahwa krisis air bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan keadilan: soal siapa yang paling terdampak, siapa yang mengambil keuntungan, dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Melalui sepuluh prinsip ini, warga Kota Makassar bersama jejaring masyarakat sipil menyerukan tata kelola air yang adil, transformatif, dan berpihak pada kehidupan. Seruan ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama memastikan bahwa laut dan air tetap menjadi sumber kehidupan, bukan ladang eksploitasi.

Dengan lahirnya Sepuluh Pakta Air Transformatif, kita menegaskan kembali bahwa perjuangan atas air adalah perjuangan atas hidup itu sendiri. Berikut sepuluh Pakta Air Transformatif yang disusun oleh Tim Mengalir Fest 2025:

1

Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa air adalah elemen penting bagi keberlanjutan semua kehidupan di dunia, dan bahwa berkembangnya badan air dan ekosistem sekitarnya harus diprioritaskan sebagai tujuan akhir itu sendiri.

2

Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa air memiliki nilai budaya, adat, sosial, spiritual dan alam yang beragam, dengan memberikan prioritas bagi sistem nilai yang memelihara kesejahteraan umum dan kepedulian lingkungan.

3

Tata Kelola Air Transformatif mengakui air dan badan air sebagai milik bersama, di mana komunitas berperan penting sebagai pemelihara pengetahuan untuk pengelolaan yang efektif, afektif, dan setara.

4

Tata Kelola Air Transformatif melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dan deklarasi hak asasi manusia sebagaimana disepakati oleh majelis umum PBB, termasuk tetapi tidak terbatas pada; Hak Asasi Manusia atas Air dan Sanitasi, Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Deklarasi Hak Masyarakat Adat, Deklarasi Hak Petani, dan Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia.

5

Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa krisis kualitas, keamanan, akses, dan distribusi air saat ini sangat berkaitan dengan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada; ekstraktivisme, intensifikasi pertanian, penggundulan hutan, bendungan sungai berskala besar, dampak terhadap keanekaragaman hayati (kehilangan keanekaragaman hayati & masuknya spesies invasif), ekstraksi air tanah industri, reklamasi lahan berskala besar, perampasan tanah, korupsi, dan perubahan iklim.

6

Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa krisis air kontemporer dibentuk oleh hubungan kekuasaan yang tidak setara dan ketidakadilan, yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi risiko dan manfaat yang berkaitan dengan air, hingga merugikan kelompok terpinggirkan termasuk perempuan, masyarakat adat, petani, etnis minoritas, petani subsisten, nelayan, dan masyarakat miskin.

7

Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa ketidakadilan yang saat ini terjadi dalam tata kelola air berakar pada sistem historis, seperti kapitalisme dan pembangunan yang tidak merata, yang tercermin dalam perubahan iklim dan logika privatisasi dan pertumbuhan tanpa batas; neokolonialisme, yang tercermin dalam hegemoni pengetahuan dan kepentingan bekas penjajah dan negara-negara industri; dan pola patriarki, yang tercermin dalam diskriminasi gender dan eksploitasi tenaga kerja perempuan (tanpa bayaran).

8

Tata Kelola Air Transformatif mengakui tanggung jawab yang berbeda terkait krisis air dan iklim kontemporer, dan bahwa tanggung jawab terhadap perubahan utamanya terletak pada negara negara industri, elite politik dan ekonomi, perusahaan (multinasional) dan kelompok serta pelaku lain yang menerima manfaat dari penggunaan air yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.

9

Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa lembaga publik yang responsif merupakan prasyarat untuk tata kelola air yang adil dan berkelanjutan, melalui kebijakan progresif, peraturan, pendanaan, kolaborasi lintas dan interdisipliner serta keterlibatan masyarakat.

10

Tata Kelola Air Transformatif menekankan perlunya ruang sipil yang aman, yang memungkinkan warga untuk berbicara dan bergerak secara bebas dan aman, sehingga berfungsi sebagai prasyarat untuk pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan adil secara sosial dalam kaitannya dengan air.



Belajar di tengah Gunung Sampah:

Potret Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Sekolah di TPA Antang

Ditulis oleh: Shakira Oqmalia Firdany

Setiap pagi, deru truk pengangkut sampah bergema di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kota Makassar. Udara lembab dan berdebu menjadi ciri khas wilayah ini, tempat ribuan ton sisa aktivitas kota berkumpul setiap harinya. Di tengah aktivitas yang padat dan lingkungan yang menantang, berdiri sebuah sekolah kecil bernama TK PABBATA UMMI, tempat anak-anak belajar mengenal dunia, huruf, angka, dan kebersihan di lingkungan yang jauh dari sempurna, namun penuh semangat.

Sekolah ini menjadi satu-satunya ruang pendidikan formal di sekitar TPA yang secara konsisten menanamkan nilai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak usia dini. Kepala sekolah, Ibu Ernie,

yang telah mengajar sejak tahun 2012, menceritakan bagaimana anak-anak di sekolahnya belajar untuk hidup bersih di tengah kondisi yang tidak selalu mendukung.

“Setiap hari kami ajarkan anak-anak untuk mencuci tangan, memotong kuku, menggosok gigi, dan menjaga kerapian. Kami ingin mereka tahu bahwa hidup bersih itu penting, dimanapun mereka berada,” ungkapnya.

Nada suaranya tenang namun tegas, mencerminkan dedikasi seorang pendidik yang tak pernah berhenti menanamkan nilai kebersihan meski dikelilingi tantangan ekologis yang nyata.

Fasilitas sekolah masih sangat terbatas.



Belajar di t Gunungan

Potret Per
Anak Sek

Tempat cuci tangan yang dahulu tersedia kini tidak lagi berfungsi. “Anak-anak sekarang mencuci tangan langsung di WC karena wastafel sudah tidak ada,” ujar Ibu Ernie. Ia menatap ke arah ruang kecil di belakang sekolah tempat anak-anak bergantian mencuci tangan sebelum makan. “Air bersihnya sudah lancar sekarang, tapi kami butuh tambahan fasilitas seperti tempat cuci tangan dan tempat sampah agar anak-anak bisa lebih mudah menerapkan kebiasaan bersih,” tambahnya menggambarkan harapan sederhana.

Setiap pagi, Ibu Ani (39) dan Ibu Tista (49) mengantar anak-anak mereka ke sekolah dan menunggu di ruang kelas hingga pembelajaran selesai. Setelah itu, keduanya melanjutkan pekerjaan sebagai pemulung di area sekitar TPA.

“PHBS anak-anak di sini sudah cukup bagus, tapi memang harus terus diajarkan. Kadang cepat lupa,” kata Ibu Ani sambil tersenyum lembut, memperhatikan anaknya yang

sedang belajar menulis di depan kelas. Di wajahnya tergambar lelah sekaligus kebanggaan, bahwa di tengah keterbatasan, anaknya tetap mendapatkan pendidikan dan nilai-nilai kebersihan yang tidak selalu mudah diterapkan di rumah.

Sementara itu, Ibu Tista menambahkan, “Tempat cuci tangan dan tempat sampah di sekolah masih kurang. Tapi anak-anak sudah tahu pentingnya hidup bersih, hanya saja perlu terus dibiasakan.” Ucapannya mengalir pelan, seolah mengingatkan bahwa kebiasaan baik tak lahir dalam semalam.

Menurut Kabarmakassar.com (2023), TPA Antang menampung sekitar 900–1.000 ton sampah setiap hari, jauh melebihi kapasitas idealnya. Tumpukan sampah yang mencapai 40–50 meter di beberapa titik menimbulkan tantangan lingkungan serius bagi warga sekitar, termasuk risiko pencemaran udara dan air lindi yang mengalir hingga ke permukiman (KLHK, 2022). Kondisi ini



engah Sampah:

ilaku Hidup Bersih dan Sehat
olah di TPA Antang

Dokumentasi Wawancara Langsung, Oktober 2025

bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga kesehatan masyarakat. Anak-anak usia sekolah yang tinggal di sekitar TPA lebih rentan terhadap penyakit berbasis lingkungan seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, dan diare akibat paparan mikroorganisme dari lingkungan terbuka.

Hasil penelitian Kurniasari dan Sari (2023) dalam *Indonesian Journal of Health Promotion* menunjukkan bahwa penerapan PHBS di wilayah terdampak pembuangan sampah menurun hingga 30% karena minimnya fasilitas sanitasi dan pengelolaan lingkungan yang kurang memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan perilaku bersih tidak akan efektif tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai.

Selain peran sekolah, Puskesmas Tamangapa secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin, dan edukasi kebersihan kepada siswa.

“Kami terbantu dengan kegiatan dari

puskesmas dan mahasiswa yang datang mengajar tentang kebersihan. Anak-anak senang karena mereka belajar sambil bermain,” tutur Ibu Ernie. Ia menghela napas sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lembut, “Air bersih sudah cukup baik sekarang, tapi kami berharap fasilitas seperti wastafel dan tempat sampah bisa ditambah supaya kegiatan kebersihan anak-anak lebih teratur.

Kata-katanya menggambarkan keyakinan seorang guru bahwa perubahan besar dapat dimulai dari hal-hal kecil, bahkan dari kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan.

Sementara itu, Ibu Rizna (35), salah satu orang tua siswa, juga menegaskan pentingnya peran keluarga dalam melanjutkan pendidikan kebersihan di rumah.

“Kalau di sekolah diajarkan cuci tangan dan gosok gigi, di rumah kami lanjutkan juga. Air sekarang sudah bagus, jadi tidak ada



Dokumentasi Wawancara Langsung, Oktober 2025

kendala. Hanya saja, anak-anak memang harus terus diingatkan supaya terbiasa. ujanya Nada suaranya tenang, tapi penuh kesadaran bahwa menjaga kebersihan bukan hanya soal fasilitas, melainkan tentang membangun kebiasaan sejak dini.

Fenomena di TPA Antang menggambarkan ironi pembangunan kota: kebersihan pusat kota bergantung pada kawasan yang harus menanggung beban pembuangannya. Anak-anak yang tinggal di sekitar TPA tumbuh dalam kondisi yang paradoks, mereka belajar tentang hidup bersih setiap hari, tetapi tinggal di lingkungan yang sarat dengan tantangan ekologis. UNICEF Indonesia (2022) mencatat bahwa anak-anak yang hidup di wilayah padat dan dekat lokasi pembuangan memiliki risiko dua kali lipat mengalami penyakit berbasis lingkungan dibandingkan anak-anak di wilayah lain. Fakta ini memperlihatkan

bahwa persoalan kebersihan dan kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga cermin dari sistem sosial dan kebijakan yang belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Meski hidup berdampingan dengan tumpukan sampah, masyarakat di sekitar TPA Antang tetap berupaya mempertahankan martabat melalui kebersihan dan pendidikan. Sekolah menjadi ruang harapan, tempat anak-anak belajar tentang nilai-nilai kebersihan, sementara orang tua mereka berjuang di luar tembok kelas untuk menafkahi keluarga.

“Kalau bukan dari sekolah, dari mana lagi anak-anak belajar hidup bersih?” ujar Ibu Ani. Kalimat itu terdengar sederhana, namun sarat makna. Ia mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan kebersihan bukan



Dokumentasi Wawancara Langsung, Oktober 2025

hanya soal lingkungan fisik, tetapi juga bentuk perjuangan untuk masa depan yang lebih baik.

Ibu Ernie selaku kepala sekolah TK cPABBATA UMMI, berharap agar pengelolaan sampah di kawasan TPA Antang dapat ditata lebih baik dan terencana, bukan hanya dengan menambah lahan pembuangan, tetapi juga melalui sistem pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga serta sekolah. Ia menilai bahwa lingkungan yang bersih akan membantu anak-anak belajar dengan lebih sehat dan nyaman. Sementara itu, Ibu Rizna, salah satu orang tua siswa, berharap agar pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai cara memilah dan membuang sampah dengan benar. Menurutnya, pengelolaan sampah di Makassar seharusnya tidak hanya berfokus pada

TPA, tetapi dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat bagi generasi berikutnya.

Kondisi di sekitar TPA Antang menjadi pengingat bahwa keadilan lingkungan tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan hak-hak dasar masyarakat yang hidup di wilayah terdampak. Fasilitas pendidikan, sanitasi, dan kesehatan harus berjalan beriringan agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan layak.

Mereka bukan sekadar anak-anak dari pinggiran TPA, tetapi bagian dari generasi yang belajar menjaga kebersihan di tempat paling sulit sekalipun generasi yang, meski kecil, telah memberi pelajaran besar tentang keteguhan dan harapan.

Referensi

Kabarmakassar.com (2023) *TPA Antang Overload, Pemkot Makassar Target Kurangi 200 Ton Sampah Organik*. Available at: <https://www.kabarmakassar.com> (Accessed: 5 Oct 2025).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022) *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: KLHK RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kurniasari, D. and Sari, R. (2023) 'Implementation of PHBS in Waste-Affected Urban Areas: Case Study in Makassar City', *Indonesian Journal of Health Promotion*, 8(1), pp. 45–58.

UNICEF Indonesia (2022) *Urban Poor Children and Environmental Health Inequality in Indonesia*. Jakarta: UNICEF.



AIR YANG TAK MENGALIR, SEHAT YANG TAK TERSENTUH:



Potret Sanitasi dan Kesehatan di Kaluku Bodoa dan Buloa

Ditulis oleh: Andi Putri Cahyaningrum

Di utara Kota Makassar, di tepian Kecamatan Tallo, Kaluku Bodoa berdiri di antara jalan sempit dan rumah-rumah panggung yang saling berdekatan. Sore itu, gerimis turun perlahan, menimbulkan aroma tanah basah dan suara riuh ember yang disusun berderet di bawah cucuran atap. Di sini, air hujan bukan sekadar cuaca, ia adalah sumber kehidupan sementara bagi banyak keluarga yang sudah lama menunggu aliran air bersih dari PDAM yang tak kunjung lancar.

“Airnya biasa keluar jam dua malam, itu pun sedikit dan keruh,” ujar Ibu Nirwana, guru TK sekaligus kader kesehatan di Kaluku Bodoa. Di rumahnya yang dihuni lima orang, air bersih menjadi barang langka yang harus dibeli dua ribu lima ratus rupiah per jerigen dari pedagang keliling. Saat kemarau tiba, sumur-sumur kering, dan warga hanya bisa berharap pada hujan yang jarang datang. Beberapa warga masih harus mandi dengan air sumur keruh atau air gerobak, sementara sebagian lain rela begadang demi menampung tetesan air yang keluar di tengah malam.

Kondisi sanitasi di Kaluku Bodoa tak kalah memprihatinkan. Banyak rumah masih memiliki jamban seadanya dari papan dan karung bekas. “Masih ada yang buang air di laut, ada juga di sungai,” katanya pelan. Ia memperkirakan masih ada enam hingga tujuh kepala keluarga yang belum memiliki jamban pribadi. Di tengah keterbatasan itu, penyakit kulit, diare, dan gatal-gatal menjadi hal biasa, penyakit yang dianggap ringan, padahal lambat laun menggerogoti kesehatan warganya.

Hasil ini sejalan dengan temuan Rahmawati *et al.* (2022) di *Jurnal MPPKI* yang menemukan bahwa kualitas fisik air bersih berhubungan signifikan dengan kejadian diare pada balita di Makassar. Penelitian serupa oleh Putri dan Sari (2023) menunjukkan bahwa sanitasi dasar yang tidak memadai, seperti jamban tidak sehat dan pembuangan limbah terbuka, menjadi faktor risiko utama peningkatan diare di pemukiman padat.

Saat gerimis mulai reda, perjalanan berlanjut menuju Kelurahan Buloa, yang letaknya tak begitu jauh dari sana. Jalan menuju Buloa melewati kawasan industri pelabuhan; truk-truk besar berlalu-lalang, membawa material bangunan dan meninggalkan debu tipis di udara lembab selepas hujan. Di bawah langit yang mulai cerah, terlihat rumah-rumah kayu berdiri di atas rawa, dan di bawahnya sampah-sampah bersebaran. Bau lembab bercampur dengan sisa plastik dan limbah rumah tangga, menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga di sini.

Di tengah lingkungan itulah Ibu Ida tinggal, seorang perempuan yang sudah dua puluh lima tahun menempati tanah tanpa sertifikat, tanpa kepastian, dan tanpa aliran air bersih dari pemerintah. “Sampai sekarang, saya masih dorong gerobak ambil air. Kadang sore belum mandi karena air belum ada. Kalau hujan, baru kami senang,” ucapnya lirih. Bagi warga Buloa, hujan adalah satu-satunya jeda dari rutinitas mengangkut air sejauh berkilometer. Bantuan sumur bor dari dinas pernah dijanjikan, namun tak semua warga dapat menikmatinya. “Katanya takut mesinnya rusak, jadi tidak disambung ke rumah-rumah,” lanjutnya.

Masalah sanitasi pun serupa dengan Kaluku Bodoa, bahkan lebih rumit. Banyak warga Buloa masih menggunakan lubang cemplung sebagai tempat buang air besar, sementara bantuan septic tank gagal terealisasi karena status tanah yang tak diakui pemerintah. “Saya sudah data berkali-kali untuk bantuan, tapi katanya tidak bisa karena tidak punya alas hak. Jadi kami dilewati saja,” kata Ibu Ida dengan nada kecewa.

Temuan ini menggambarkan kesenjangan pelayanan publik di daerah padat dan informal. Studi oleh Susanti *et al.* (2024) di *Jurnal Kesehatan Lingkungan UHO* menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA dan diare pada masyarakat pesisir berkorelasi erat dengan sanitasi lingkungan yang buruk dan pembuangan limbah di area sekitar rumah. Begitu pula penelitian Lestari dan Rahmadani (2021) menunjukkan bahwa ketidaktersediaan air bersih dan ventilasi yang buruk meningkatkan risiko ISPA di daerah padat penduduk.



AIR YANG TAK MENEGALIR, SEHAT YANG TAK TERSENTUH.

Namun yang paling dirasakan warga bukan hanya kekurangan air, melainkan kehilangan hak untuk hidup sehat. Warga yang menggantungkan hidup dari laut dan kerja harian kini menghadapi ancaman baru: penyakit, sampah yang menumpuk, dan rasa pasrah yang diam-diam tumbuh di antara mereka. “Kami mau lingkungan bersih, tapi susah. Tidak ada yang jemput sampah, mau buang ke mana lagi?” ujar Ibu Ida.

Hal ini diperkuat oleh Riyadi *et al.* (2020) yang menemukan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak optimal berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi kulit dan gangguan pernapasan pada masyarakat pesisir.

Kedua kelurahan ini, Kaluku Bodoa dan Buloa, berbagi cerita yang serupa: air yang sulit dijangkau, sanitasi yang belum layak, dan masyarakat yang terus berjuang menjaga martabat di tengah keterbatasan. “Kalau air tidak ada, tidak ada sehat. Semua itu kembali ke air,” kata Ibu Nirwana menutup percakapan.

Sore di Kaluku Bodoa kembali hening. Hujan sudah benar-benar berhenti, hanya menyisakan genangan di jalan tanah dan suara truk yang kembali melintas pelan. Di antara sisa hujan itu, harapan tetap hidup, harapan sederhana agar suatu hari nanti, air bersih tak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak yang benar-benar mengalir di setiap rumah.



Daftar Pustaka

- Rahmawati, D., Yuliana, R. & Arsyad, A. (2022). *Hubungan Kualitas Fisik Air Bersih dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pertiwi Kota Makassar*. Jurnal MPPKI, 7(2), 45-53.
- Putri, M. & Sari, D. (2023). *Kondisi Sarana Sanitasi Dasar dengan Kejadian Diare pada Balita di Nagari Campago*. Jurnal Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan, 4(1), 22-30.
- Susanti, N., Wahyuni, R. & Mardiana, S. (2024). *Sanitasi Lingkungan dan Kejadian Penyakit ISPA pada Balita di Desa Wonua Morini, Konawe*. Jurnal Kesehatan Lingkungan UHO, 6(1), 12-19.
- Lestari, A. & Rahmadani, F. (2021). *Analisis Hubungan Kondisi Sanitasi Pemukiman dan Faktor Perilaku terhadap Kejadian ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Sememi Surabaya*. Jurnal Ikesma, 17(1), 55-64.
- Riyadi, H., Saputra, D. & Kusnadi, R. (2020). *Hubungan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Gangguan Kesehatan pada Masyarakat Pesisir*. Jurnal Kesehatan Lingkungan Nasional, 9(2), 101-110.





MPIN
SEKOLAH
ORANG TUA & SISWA
OU AR RASYID
OLAK

JAGA AIR KAN
KARENA M. MARKOTG
PASA TIGA
PASA TIGA
PASA TIGA

ORANG TUA & SISWA

KAMI BUTUH
UDARA SEGAR,
BUKAN
TOLUSI UDARA

SOLUSI BERUJUNG ANCAMAN;

MENYIKAPI RENCANA PEMBANGUNAN
PLTSA DAN HARAPAN DI TENGAH
KEKHAWATIRAN AKAN DAMPAKNYA
BAGI KESEHATAN

Ditulis oleh: Syabila Nur Ramadhani Putri

Dahulu rasanya harapan akan kesehatan masa depan terasa begitu nyata. udara yang kami hirup terasa begitu asri dan menyegarkan, pemandangan pagi didominasi oleh hijaunya sawah yang membentang dan suara gemericik sungai yang jernih.

Namun kini bayang-bayang itu muncul menyeruak pikiran, menghampiri hingga menciptakan kegelisahan dalam hati.

Inovasi modern yang seharusnya menjadi solusi pengelolaan sampah, kini justru terasa seperti ancaman yang menakutkan. Keasrian yang dulu kami rasakan perlahan memudar, digantikan oleh kekhawatiran mendalam bahwa kami akan kehilangan harapan kesehatan kami akibat cerobong asap beracun yang mungkin akan berdiri tegak di tengah-tengah lingkungan kami.



Di tengah upaya kota Makassar dalam mencari jalan keluar dari persoalan sampah yang menumpuk, terdapat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Sekilas, gagasan program ini terdengar menjanjikan sebagai solusi cerdas mengatasi permasalahan sampah dan energi. Tapi di balik janji itu, ada keresahan yang pelan-pelan tumbuh di kalangan warga, terutama mereka yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTSA.

Salah satu kekhawatiran masyarakat mengenai nasib kesehatan, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Kekhawatiran semakin besar ketika rencana pembangunan diarahkan ke kawasan padat penduduk. Asap hasil pembakaran dikhawatirkan akan memperburuk kualitas udara, terutama di pemukiman yang memiliki ventilasi minim dan jarak rumah yang berdekatan. Masyarakat khawatir jika pengelolaan PLTSA tidak dilakukan dengan benar, asap dari pembakaran berpotensi membahayakan kesehatan.

Kekhawatiran ini disuarakan lantang oleh Ibu Novi, seorang warga Mula Baru yang bertempat tinggal sangat dekat dengan rencana lokasi PLTSA. “Kalau PLTSA ini benar akan dibangun disini, saya rasa hal ini sangat berdampak negatif bagi kesehatan. Saya juga sudah membaca sekilas informasi melalui internet bahwa asap yang dihasilkan dari pembakaran sudah pasti mengandung bahan berbahaya bagi tubuh yang dapat menyebabkan ISPA hingga Kanker”



Hal ini berlandaskan bahwa PLTSA menggunakan sistem insinerasi dimana pembakar sampah dilakukan pada suhu tinggi untuk menghasilkan energi listrik. Meski terdengar efisien, proses pembakaran ini berpotensi menghasilkan dioksin dan furan, dua zat beracun yang dapat menumpuk dalam tubuh manusia. Jika terhirup atau terpapar dalam jangka panjang, bahan ini dapat menimbulkan gangguan pernapasan, penyakit kulit, gangguan hormonal, hingga kanker.

Masyarakat mulai bertanya tanya: apakah udara disekitar kita akan tetap aman untuk dihirup setiap hari? Apakah pembangunan energi dari sampah ini benar-benar akan menjadi solusi atau justru membuka ancaman baru bagi kesehatan mereka?

Ibu novi menceritakan pahitnya kehidupan yang harus ia jalani selama tiga tahun sebab menjadi perokok pasif di lingkungannya. Baginya, rencana pembangunan PLTSA ini seperti mengundang kembali ancaman yang sudah ia taklukkan.





SOKE BERUT ANCA

"Tahun 2021, saya pernah divonis dokter terkena tumor," ujar ibu novi memulai kisahnya. "Dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan pengangkatan, namun rencana operasi pengangkatan tidak dapat dilakukan sebab paru-paru saya penuh cairan sehingga harus dilakukan penyedotan cairan terlebih dahulu," Dokter menduga kuat penyebab kondisi ini efek jangka panjang oleh paparan rutin asap rokok yang selama ini ia hirup dari perokok aktif di lingkungan rumahnya.

Perjuangannya Ibu Novi semakin berat ketika dokter mengumumkan tumor yang diderita sudah berubah menjadi kanker "Saat mau diangkat saya divonis terkena kanker ovarium stadium satu, dan terancam tidak bisa hamil," ujarnya. Namun di tengah vonis yang menyedihkan itu, sebuah keajaiban terjadi. "Saat saya mau menjalankan kemoterapi, ternyata ALLAH

mengizinkan saya untuk hamil." Kenangnya. Kehamilan ini menjadi angin segar yang tak terduga, membuatnya memilih menunda kemoterapi demi janin yang dikandung.

Sayangnya, enam bulan pasca melahirkan, kankernya kembali mengganas. "Tumor tersebut tumbuh semakin besar, dan kanker saya melonjak ke stadium tiga," ucapnya pilu.

Ibu Novi harus melalui operasi besar pengangkatan rahim dan ovarium kiri disusul rangkaian kemoterapi selama enam bulan dan kini masih berobat jalan. "Alhamdulillah ALLAH masih memberikan saya kesempatan untuk hidup," ungkapnya penuh harapan.

Pengalaman pahitnya melawan penyakit yang dipicu polusi udara ini memicu kekhawatiran besar, jika polusi rokok yang dihirup setiap hari saja dapat menyebabkan

POLUSI KANKER; MULA BARU

penyakit serius, bagaimana dampaknya jika polusi berasal dari cerobong asap limbah pembakaran PLTSA?

Di Tengah kekhawatiran itu terselip pula harapan besar, Ibu Novi tidak ingin orang lain menderita sepertinya. Ia teringat teman-teman seperjuangannya yang menyerah karena penyakit kanker "Saya rasa cukup saya yang merasakan sakitnya penderitaan menghadapi dampak dari polusi udara," katanya tulus. "Saya harap anak, cucu, keluarga, dan tetangga saya, mereka tidak merasakan yang saya rasakan."

Permintaan agar rencana PLTSA ditinjau ulang semakin tegas. "Saya rasa jika PLTSA ini mau dibangun baiknya tidak dibangun di lingkungan Kota Makassar," ujar Hj. Azis, salah satu warga Mula Baru. Ia beralasan, "Kota Makassar ini bisa dibilang sudah padat penduduk, pastinya akan membahayakan untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat." Suara warga ini

bukanlah penolakan terhadap kemajuan; sebaliknya, mereka meminta agar keselamatan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Sebab, bagi warga Masyarakat, pembangunan sejati bukan hanya tentang menyalakan listrik dari sampah, tetapi juga tentang menjaga setiap nafas bersih yang dihirup di masa depan.

Solusi energi berbasis sampah memang menjanjikan, tetapi harus mempertimbangkan secara serius aspek kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem di atas segalanya. Inovasi harusnya menjadi jawaban, bukan menambah ancaman bagi generasi yang akan datang. Harapan kami sederhana pastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil hari ini tidak merenggut hak anak cucu kami atas udara yang bersih dan masa depan yang sehat.

PESTA RAKYAT PESISIR JENEPONTO:

Simbol **Perjuangan
Perempuan Nelayan**
Lawan Pencemaran
Tambak Udang

Ditulis oleh: Fadila Abdullah



Jeneponto - Ratusan warga pesisir, pemuda, komunitas lokal, hingga organisasi masyarakat sipil berkumpul di Pesta Rakyat Pesisir Jeneponto yang digelar di Desa Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Bagi peserta, agenda itu adalah simbol perjuangan perempuan nelayan melawan pencemaran lingkungan akibat tata kelola tambak udang yang tidak tepat.

Diketahui, Pesta Rakyat Pesisir Jeneponto diselenggarakan oleh Bina Desa, Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangarri (KPNS), dan KIARA dengan dukungan jaringan masyarakat pesisir Sulawesi Selatan dan berlangsung selama dua hari, Sabtu-Ahad, 13-14 September 2025.

Ketua KPNS Jeneponto, Kasmawati menceritakan agenda itu lahir dari keresahan masyarakat atas terancamnya sumber pangan dan mata pencaharian warga pesisir, khususnya perempuan nelayan pembudidaya rumput laut. Sejak eksisnya perusahaan tambak udang skala besar, limbahnya telah merusak ekosistem laut, menurunkan produksi rumput laut, hingga menghilangkan ikan dan kerang-kerangan yang menjadi sumber pangan keluarga.

Akhirnya, acara itu menegaskan tiga hal tentang posisi dan sikap masyarakat pesisir Jeneponto. Pertama, mereka lantang menolak pencemaran laut akibat limbah tambak udang. Biota laut yang menjadi bahan pangan masyarakat selama ini terancam hilang jika tambak udang masih beroperasi tanpa pengawasan yang ketat.



“Perempuan nelayan menanggung beban berlapis. Mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga harus mengelola pangan keluarga, ekonomi rumah tangga, bahkan menjadi tulang punggung ketika laki-laki bermigrasi mencari pekerjaan,” ujar Kasmawati.

Selama dua hari itu, peserta yang hadir menggelar berbagai kegiatan, mulai dari Kemah Pemuda Pesisir, Festival Pangan Lokal, Bincang Pesisiran, Lomba Anak, Pemutaran Film Dokumenter, hingga Panggung Apresiasi Seni Budaya. Parade Perahu Rakyat menandai puncak acara, yang membawa pesan solidaritas dan tuntutan rakyat pesisir agar pemerintah segera menghentikan pencemaran serta memastikan keadilan agraria pesisir.



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

Saat parade, nelayan membentangkan spanduk tuntutan di laut, melaksanakan ritual budaya caru serta potong tumpeng rumput laut sebagai simbol perjuangan menjaga sumber pangan rakyat. Penyelenggara menutup kegiatan itu dengan makan bersama sebagai simbol persatuan dan solidaritas warga.





Kedua, masyarakat pesisir Jeneponto juga menuntut perlindungan hak-hak perempuan nelayan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Ketiga, membangun solidaritas masyarakat pesisir Sulawesi Selatan, tak hanya di Jeneponto, tetapi juga daerah lain yang merasakan nasib serupa.

Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelibatan Perempuan WALHI Sulsel, Fadila Abdullah juga membacakan maklumat yang menegaskan bahwa permasalahan pesisir dan pulau-pulau kecil tak hanya soal lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan gender.

Situasi ini, kata Fadila, menuntut adanya kebijakan inklusif yang melibatkan perempuan secara aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir:

Ia menuturkan tambak udang skala besar yang mencemari wilayah tangkap masyarakat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial hingga kesehatan, terutama perempuan.

“Di pesisir, perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya, pengelolaan hasil laut, pemenuhan air bersih, hingga mengurus rumah tangga,” kata dia.

Selama ini, lanjut Fadila, perempuan pesisir telah menanggung banyak beban, mulai dari upaya memperoleh air bersih yang harus menempuh jarak yang jauh, hingga berkurangnya hasil tangkapan ikan.

Jika hal itu terus berlanjut, khususnya di pesisir Jeneponto, perempuan berpotensi kehilangan sumber penghidupan dan ruang sosial.

“Beban ganda yang dialami perempuan semakin berat, tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga menjalankan peran domestik di tengah kondisi lingkungan yang memburuk,” tutur Fadila. Karena itu, Fadila menyebut pemerintah harus melihat Pesta Rakyat Pesisir Jeneponto sebagai ruang untuk menghimpun aspirasi dan keresahan warga.

“Masalah ini bisa diatasi dengan pemerintah melahirkan kebijakan yang inklusif dengan melibatkan perempuan secara tepat dalam pengelolaan wilayah pesisir,” tandas dia.



INFO

Pulihkansulsel

WALHI SULSEL

BACA SELENGKAPNYA DI WEBSITE
WALHI SULAWESI SELATAN

SCAN OR BARCODE



<https://bit.ly/walhisulsel>

BRING BACK ENVIRONMENTAL CRIME: WALHI SULSEL BERSAMA JARINGAN MASYARAKAT DIRIKSI POSKO ADUAN AKTIVITAS ILEGAL DI SULAWESI SELATAN

Makassar, 15 Oktober 2025 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan bersama Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Sulsel, LPA HPPMI Maros, Yayasan Peduli Lingkungan, dan Lapar Sulsel meluncurkan Posko Aduan Aktivitas Ilegal yang Merusak Lingkungan di Sulawesi Selatan. Inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas semakin maraknya praktik-praktik ilegal seperti pertambangan, perkebunan, dan perumahan yang merampas ruang hidup rakyat dan memperparah krisis ekologis di daerah. Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin menjelaskan bahwa posko ini menjadi wadah kolektif untuk mengurai dan menindak aktivitas-aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan daerah.

BAHAS KRISIS AIR DI UTARA, WALHI SULSEL BERSAMA PEREMPUAN PEJUANG AIR BERSIH TALLO TEMUI WALI KOTA MAKASSAR

Rabu (13 Agustus 2025), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan Bersama dengan Perempuan Pejuang Air Bersih (PARAS) Tallo melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Audiensi ini juga dihadiri langsung oleh Direktur PDAM Kota Makassar dan Kepala Dinas PU Kota Makassar, Fadila Abdillah, Kepala Divisi Keterlibatan Perempuan WALHI Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa ini adalah kesempatan yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat khususnya perempuan yang ada di tiga kelurahan yang selama ini kami damping yakni Kelurahan Tallo, Kaluku Bodoa, dan Buloa.

WALHI SULSEL BERSAMA ANAK MUDA KOTA MAKASSAR SUKSES GELAR MENGAIR FEST UNTUK PERLINDUNGAN LAUT DAN KEADILAN AIR

Makassar — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menutup bulan Agustus dengan menggelar kegiatan kampanye bertajuk Mengair Fest Jejak Perlindungan Laut dan Keadilan Air. Dalam kegiatan ini WALHI Sulsel berkolaborasi dengan sejumlah organisasi dan komunitas terdiri dari HIMA PPKn FIS-H UNM, HIMATEP FIP UNM, HUMAN FISIP UH, Green Youth Celebes, dan PC IMM Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dimulai dari tanggal 29 sampai 31 Agustus 2025 di Pusat Dakwah Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Taman Pintu Satu UNHAS, dan Kampung Pesisir Tallo Makassar. Mengair Fest merupakan festival edukasi, kampanye, dan advokasi yang menghadirkan ruang pertemuan antar warga, komunitas, peneliti, seniman, dan aktivis lingkungan. Festival ini bertujuan menghubungkan gerakan perlindungan laut dengan perjuangan hak atas air bersih, melalui rangkaian kegiatan seperti diskusi publik, workshop eco-printing, mural, seni pertunjukan, rembuk warga, dan parade.





